

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Busroh, Abu Daud, 2010, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Cipto, Bambang, 2007, *Politik Pemerintahan Amerika*, Lingkaran Buku, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Indrayana, Denny, 2016, *Jangan Bunuh KPK Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Intrans Publishing, Malang.
- Koesoemahatmadja, 1979, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Kusnardi, Moh dan Bintang R. Saragih, 2008, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Hendratno, Edie Toet, 2009, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, Dan Federalisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Huda, Nimatul, 2013, *Otonomi Daerah Filosofi Sejarah Perkembangan Dan Problematika*, Pustaka Pejar Offset, Yogyakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin, 2016, *Lembaga Negara Independent: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataanya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, PT Raja Grafinfo Persada, Jakarta

- Nurbaningsih, Enny, 2019, *Problematisasi Pembentukan Peraturan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Soejito, Irawan 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Siagian, Sondang P., 2013, *Birokrasi Pemerintahan Dan Kekuasaan*, Jakarta, PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Situmorang, Victor, 1994 *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Strong, CF, 2014, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Nusa Media, Bandung.
- Sumardjono, Maria S.W., 2019, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Edisi Revisi*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sunny, Ismail, 1985, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Aksara Baru, Jakarta.
- Tauda, Gunawan A., 2012, *Komisi Negara Independen Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Press, Yogyakarta.

## **2. Makalah**

- Asshiddiqie, Jimly, “Beberapa Catatan Tentang Lembaga-Lembaga Khusus dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, *Bahan Diskusi dan Seminar Nasional Lembaga-Lembaga Non Struktural oleh Kementerian PAN dan RB*, 01 Maret 2011.
- Hosseini, Benyamin, “Diskusi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Jangka Panjang” *Bahan Diskusi dan Seminar oleh Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah, BAPPENAS*, 27 November 2012.

## **3. Jurnal**

- Aris, Ismail, “Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif Teori The New Separation of Powers”, *Jurnal Jursprudenti*, Volume 5, Nomor 1, Juni, 2018.

- Ghazali, “Politik Hukum: Pemberian Kewenangan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Konteks Otonomi Daerah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Muamalat Volume VIII, Nomor 1, Juni, 2016.
- Heryanto, Yanto, “Implementasi Good Governance Dalam Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Indonesia”, *Jurnal Logika*, Volume XII, Nomor 3, Tahun 2014.
- Kasim, Muslim, Andi Pangerang Moenta, dan Ahmad Ruslan, “Penataan Lembaga Non Struktural Dalam Rangka Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume. 8, Nomor 1, Februari, 2019.
- Lay, Cornelis, *State Auxiliary Agencies*, *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 12 Tahun III, April-Juni, 2006.
- Marlina, Rika, “Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia”, *Jurnal Daulat Hukum* Volume. 1. No. 1, Maret, 2018.
- Nurtjahjo, Hendra, “Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen, (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-35, Nomor 3, Juli-September, 2005.
- Polamolo, Susanto, “Reformasi Konstitusi Indonesia: Fenomena Transisi Kekuasaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Supremasi Hukum*, Volume 11, Nomor 2, Juni, 2014
- Rinardi, Haryono, “Dari RIS menjadi Negara RI, Perubahan Bentuk Negara Indonesia Pada Tahun 1950”, *Mozaik, Jurnal Ilmu Humaniora*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember, 2012.
- Saputra, Dimas Adi, “Peran Kelembagaan Non Struktural Dalam Praktik Desentralisasi :Studi Kasus Pada BPK2L, BPPB SIMA, dan DP2K Kota Semarang”, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Volume 7, Nomor 2, April 2018.
- Zoelva, Hamdan, “Tinjauan Konstitusional Penataan Lembaga Non Struktural di Indonesia”, *Jurnal Negarawan*, Nomor 18, November, 2010.

#### 4. Karya Ilmiah

Antonius, Andi Sandi dan Dian Agung Wicaksana, 2015, “Penataan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Laporan Hasil Penelitian Program Hibah Penelitian Dosen Kelompok II Tahun 2015*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Kencana, Novia, 2015, “Dinamika Kelembagaan (Suatu Kajian tentang Proses Penggabungan Lembaga Ombudsman DIY dan Lembaga Ombudsman Swasta DIY)”, *Tesis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Muttaqin, Labib, 2015, “Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Perspektif Lembaga Non Struktural Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Perubahan Kelembagaan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila)”, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ramadani, Rizki, 2016, “Independensi Lembaga Negara Independen (Studi Dalam Konsep Independent Regulatory Agencies)”, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wulandari, 2014, “Desentralisasi Lembaga Negara Independen Dalam Negara Kesatuan”, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

#### 5. Internet

Kementerian PPA, “Bentuk UPTD PPA, Negara Tingkatkan Layanan Bagi Korban Kekerasan”,  
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2352/bentuk-uptd-ppa-negara-tingkatkan-layanan-bagi-korban-kekerasan>, diakses pada tanggal 27 Juli 2020.

Pemerintah Daerah DIY, “Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta”,  
<https://jogjaproprov.go.id/profil/3-sejarah>, diakses pada tanggal 21 Juli 2020.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, KBBI Daring, "Independen", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/independen>, diakses pada tanggal 10 April 2020.

## 6. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 282 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215)
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46 Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4624)
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285)
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial  
dan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2012 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5305)
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72  
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87 Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi  
Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan  
AIDS Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan  
Kemiskinan.
- Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan  
AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016  
Nomor 367)
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan  
Nomor 9 Tahun 2006 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala  
Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan  
Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang  
Pengawasan Pestisida

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337)
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 154)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532)
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5)
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6)
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7)
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan



Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 10)

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 12)

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang RPJMD 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6)

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7)

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6)

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5)

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 )

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 )



- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah. Materi Muatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 )
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 )
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) (Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 3 Seri E )
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 A Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 22 Seri E )
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 22 Seri E )
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 26)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2009 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 28)

- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 1)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2010 tentang Dewan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 32)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 35)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 11)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pusat Perbenihan Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2011 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 18)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2012 tentang Komisi Penanggulangan AIDS DIY (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 59)
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Lembaga Non Struktural Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 59)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 66)
- Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyan Utami (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 67)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 31)

- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 61)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2013 tentang Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 63)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Forum Pembauran Kebangsaan Dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Forum Koordinasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 9)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 28)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2014 tentang Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 71)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 111)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 3)

- Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Parampara Praja (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 20)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2016 tentang Komisi Informasi Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 30) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Komisi Informasi Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 34)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2017 tentang Sekretariat Bersama Pengelolaan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 72)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 76)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum TSLP (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 23)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 72)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2018 tentang Parampara Praja (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 83)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Dewan Kebudayaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 2)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat Rescue Istimewa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 4)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2019  
tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan (Berita Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 21)